

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH DINAS PERKEBUNAN KALTIM



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PERKEBUNAN
TAHUN 2017**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Dengan mengucapkan syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 dapat diselesaikan.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 disusun untuk memenuhi ketentuan konstitusional Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang sistematis, penyusunan dan tatacara penyampaian diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.

Laporan ini secara garis besar memberikan informasi tentang pelaksanaan program kerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur yang telah ditetapkan selama 1 (satu) tahun anggaran dan diharapkan dapat menjadi bahan bagi Pemerintah Daerah untuk mengevaluasi keberhasilan penyelenggaraan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan.

Semoga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) memberi manfaat bagi semua pihak, khususnya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di masa yang akan datang.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Kepala Dinas Perkebunan Prov. Kaltim

Ir. Ujang Rachmad, MSI

NIP. 19690120 199403 1 014



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Dasar Hukum	3
2. Gambaran Umum	4
BAB II PROGRAM DAN KEGIATAN	19
1. Program dan Kegiatan Kerja	19
2. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	20
3. Alokasi dan Realisasi Anggaran	26
4. Perencanaan Pembangunan	28
5. Sarana dan Prasarana	30
6. Permasalahan dan Solusi	30
BAB III PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN	32
1. Tugas Pembantuan Yang Diterima	32
2. Tugas Pembantuan Yang Diberikan	36
BAB IV TUGAS UMUM PEMERINTAHAN	37
BAB V PENUTUP	38

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Jumlah pegawai berdasarkan golongan dan gender	9
Tabel 1.2.	Jumlah pegawai berdasarkan eselon dan gender	9
Tabel 1.3.	Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dan gender	9
Tabel 1.4.	Jumlah pegawai berdasarkan DIKLATPIM dan gender	10
Tabel 1.5.	Jumlah pegawai berdasarkan jabatan fungsional tertentu dan gender	10
Tabel 2.1.	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Berdasarkan Evaluasi Rencana Kerja	21
Tabel 2.2.	Capaian Indikator Kinerja Utama SKPD	26
Tabel 2.3.	Rincian APBD dan Realisasi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016	27
Tabel 3.1.	Realisasi Output Kegiatan Satuan Kerja 05 Tahun 2017	33
Tabel 3.2.	Anggaran dan Realisasi Satuan Kerja 05 Tahun 2017	34
Tabel 3.3.	Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan	36
Tabel 3.4.	Anggaran dan Realisasi TP Kabupaten Kutai Barat Tahun 2016	43
Tabel 3.5.	Realisasi Output Kegiatan Satuan Kerja 07 Tahun 2016	44
Tabel 3.6.	Anggaran dan Realisasi Satuan Kerja 07 Tahun 2016	45
Tabel 3.7.	Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan	46
Tabel 3.8.	Realisasi Output Kegiatan Satuan Kerja 08 Tahun 2016	47
Tabel 3.9.	Anggaran dan Realisasi Satuan Kerja 08 Tahun 2016	48
Tabel 3.10.	Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan	49

BAB I PENDAHULUAN

Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu pintu gerbang pembangunan di Wilayah Indonesia Bagian Timur dan secara geografis Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari luas wilayah daratan 127.346,92 km², terletak antara 113°35'31" dan 119°12'48" bujur timur, dan antara 2°34'23" lintang utara dan 2°44'14" lintang selatan. 119°00' Bujur Timur serta diantara 4°24' Lintang Utara dan 2°25' Lintang Selatan. Dengan adanya perkembangan dan pemekaran wilayah, Kalimantan Timur yang merupakan provinsi terluas kedua setelah Papua dibagi menjadi 7 (Tujuh) Kabupaten. 3 (Tiga) kota, 103 kecamatan dan 834 desa dan 198 kelurahan. Tujuh Kabupaten tersebut adalah Paser dengan ibukota Tanah Grogot, Kutai Barat dengan ibukota Sendawar, Kutai Kartanegara dengan ibukota Tenggarong, Kutai Timur dengan ibukota Sangatta, Berau dengan ibukota Tanjung Redeb, Penajam Paser Utara dengan ibukota Penajam, dan Mahakam Ulu dengan ibukota Long Bagun. Sedangkan tiga kota adalah Balikpapan, Samarinda dan Bontang.

Sub Sektor Perkebunan mempunyai peranan yang strategis dalam pembangunan ekonomi, sosial maupun ekologi di Kalimantan Timur. Peranan tersebut semakin penting dan strategis karena merupakan sub sektor yang berbasis sumber daya alam yang relatif tidak tergantung pada komponen impor. Kegiatan pembangunan perkebunan di Kalimantan Timur dilaksanakan dengan berbagai pola pengembangan seperti pola Perkebunan Besar Swasta (PBS), Pola Perkebunan Besar Negara (PBN) dan Perkebunan Rakyat yang dalam periode 2013–2018 telah memberikan hasil cukup menggembirakan yang ditunjukkan dengan semakin meningkatnya produksi. Produksi dan luas areal diperkirakan terus meningkat seiring dengan tumbuhnya investasi baik dari swadaya murni

masyarakat, bantuan pemerintah maupun perusahaan swasta perkebunan (PBS).

Pembangunan sub sektor perkebunan di Kalimantan Timur merupakan bagian pembangunan nasional, berorientasi pada upaya pembangunan ekonomi rakyat dengan penekanan pada peningkatan kesejahteraan rakyat, penanggulangan kemiskinan serta untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri dalam negeri dan sekaligus mendukung peningkatan ekspor yang berbasis bahan baku terbarukan dan ramah lingkungan.

Sampai dengan tahun 2017 luas areal 1.352.067 Ha. Sejalan dengan pertambahan luas areal, maka sebagian tanaman produksinya mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan adanya peningkatan luas areal yang produktif (tanaman menghasilkan) sebagai hasil kegiatan peremajaan dan perluasan areal pada pelaksanaan pembangunan perkebunan tahun 2017 yang terus meningkat. Produksi Perkebunan tahun 2017 sebesar 13,22 juta ton, naik 13,03% dibanding tahun 2016 dengan jumlah produksi 11.49 juta ton. Kelapa sawit merupakan komoditas unggulan perkebunan yang mengalami peningkatan yang signifikan baik luas areal maupun produksinya. Hal ini dikarenakan telah terlaksananya Program Satu Juta Hektar Kelapa Sawit di Kalimantan Timur. Hingga tahun 2017 luas areal kelapa sawit mencapai telah 1.192.342 ha terdiri dari PBS seluas 893.417 ha, PTPN seluas 14.402 ha, perkebunan rakyat seluas 284.523 ha. Sedangkan produksi sawit pada tahun 2016 produksi sawit mencapai 14.50 juta ton tandan buah segar (TBS).

Tanaman Karet merupakan komoditi tradisional di Kalimantan Timur yang sudah relatif lama diusahakan sebagai perkebunan rakyat. Luas areal penanaman karet pada tahun 2017 tercatat seluas 115.160 Ha yang terdiri dari areal perkebunan rakyat 92.809 Ha, perkebunan besar negara

sebesar 399 Ha dan perkebunan besar swasta 21.952 Ha dengan produksi seluruhnya berjumlah 66.126 ton karet kering.

Berdasarkan RTRW Provinsi Kalimantan Timur, lahan peruntukan perkebunan seluas 3.269.561 ha dengan luas yang telah dibebani ijin perkebunan sebesar 3.091.628 ha. Adapun jumlah perkebunan besar swasta di Kalimantan Timur berjumlah 358. Dilihat dari data tersebut, potensi pengembangan perkebunan masih besar.

1. Dasar Hukum

Perkembangan Organisasi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur mempunyai sejarah yang cukup panjang, yaitu dimulai dengan dibentuknya Kantor Karet Cabang Kalimantan Timur pada tahun 1952 dan Yayasan Karet Kalimantan Timur (cabang Kalimantan Selatan) pada tahun 1957. Kedua lembaga ini kemudian digabung menjadi Dinas Karet pada tahun 1963 yang kemudian mengalami perubahan nomenklatur menjadi Dinas Perkebunan Rakyat Kalimantan Timur pada awal Pelita I (April 1969). Melalui Peraturan Daerah Nomor 06 tahun 1978 yang disempurnakan lagi dengan Peraturan Daerah Nomor 06 tahun 1984 nomenklatur menjadi Dinas Perkebunan Propinsi Dati I Kalimantan Timur. Melalui Surat Keputusan Gubernur Propinsi Kalimantan Timur Nomor 03 dan Nomor 16 tahun 2001 Dinas Perkebunan Propinsi Kalimantan Timur kembali mengalami perubahan. Kemudian struktur organisasi Dinas Perkebunan Propinsi Kalimantan Timur disempurnakan melalui Peraturan Daerah Nomor 04 tahun 2003 dan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 03 tahun 2004. Perubahan tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur mengalami perubahan lagi berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 45 Tahun 2008

tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Pada tahun 2016, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur mengalami perubahan Struktur Organisasi Tata Laksana berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tanggal 22 November 2016.

2. Gambaran Umum

A. Struktur Organisasi

Mengacu pada Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 74 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 105 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, struktur organisasi beserta tugas pokok dan fungsinya sebagaimana berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dengan membawahi Bagian Sekretariat, Bidang Pengembangan Komoditi, Bidang Usaha, Bidang Pengolahan dan Pemasaran, Bidang Perkebunan Berkelanjutan, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi dalam perumusan kebijakan, perencanaan program, administrasi umum, kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, administrasi keuangan, pengelolaan aset, monitoring, evaluasi dan pelaporan. Sekretariat membawahi :

- a. Sub Bagian Perencanaan Program
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Sub Bagian Keuangan dan Aset

3. Bidang Pengembangan Komoditi

Bidang Pengembangan Komoditi mempunyai tugas pokok untuk Merumuskan kebijakan teknis, memberikan pelayanan administrasi dan regulasi pelaksanaan pada kegiatan pengembangan komoditi.

Bidang Pengembangan Komoditi membawahi :

- a. Seksi Penyiapan dan Perluasan Lahan
- b. Seksi Budidaya Tanaman
- c. Seksi Pengembangan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia

4. Bidang Pengolahan dan Pemasaran

Bidang Pengolahan dan Pemasaran mempunyai tugas pokok untuk Merumuskan kebijakan teknis, memberikan pelayanan administrasi dan regulasi pelaksanaan pada kegiatan pengolahan Pemasaran.

Bidang Pengolahan dan Pemasaran membawahi :

- a. Seksi Pengolahan Pasca Panen
- b. Seksi Bimbingan Usaha
- c. Seksi Promosi dan Pemasaran

5. Bidang Usaha

Bidang Usaha mempunyai tugas pokok untuk Merumuskan kebijakan teknis, memberikan pelayanan administrasi dan regulasi pelaksanaan usaha perkebunan. Bidang Usaha membawahi :

- a. Seksi Pembinaan Usaha
- b. Seksi Penanganan Konflik Usaha
- c. Seksi Pembinaan Kebun Kemitraan

6. Bidang Perkebunan Berkelanjutan

Bidang Perkebunan Berkelanjutan mempunyai tugas pokok untuk Merumuskan kebijakan teknis, memberikan pelayanan administrasi dan regulasi pelaksanaan pada kegiatan penyuluhan perkebunan, pemberdayaan masyarakat, perhutanan sosial dan promosi mitigasi iklim. Bidang Perkebunan Berkelanjutan membawahi :

- a. Seksi Pengendalian Kebakaran Kebun
- b. Seksi Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca
- c. Seksi Konservasi Lahan dan Air

7. UPTD Pengawasan Benih Perkebunan

UPTD Pengawasan Benih Perkebunan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka melaksanakan sebagian tugas teknis dinas dalam bidang pengawasan mutu benih tanaman perkebunan, menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, pengujian dan sertifikasi mutu benih serta melaksanakan urusan ketatausahaan. UPTD Pengawasan Benih Perkebunan membawahi :

- a. Seksi Pengujian Mutu dan Sertifikasi Benih
- b. Seksi Pengawasan dan Peredaran Benih
- c. Sub Bagian Tata Usaha

8. UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan

UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka melaksanakan sebagian tugas teknis dinas dalam bidang pengembangan perlindungan tanaman perkebunan, menyelenggarakan uji laboratorium, uji lapang, pengamatan dalam rangka pengendalian hama penyakit dan gulma/Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) serta melaksanakan urusan ketatausahaan. UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan membawahi :

- a. Seksi Pengendalian OPT
- b. Seksi Pengembangan Bio Pestisida dan APH
- c. Sub Bagian Tata Usaha

9. UPTD Teknologi Terapan Perkebunan

UPTD Teknologi Terapan Perkebunan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka melaksanakan sebagian tugas teknis dinas dalam bidang teknologi terapan perkebunan, melakukan uji lapang teknologi budidaya dan teknologi pasca panen untuk memperoleh paket teknologi tepat guna dan melaksanakan urusan ketatausahaan. UPTD Teknologi Terapan Perkebunan membawahi :

- a. Seksi Penyediaan Bahan Tanaman
- b. Seksi Teknologi Terapan Pengolahan Hasil
- c. Sub Bagian Tata Usaha

Bagan struktur organisasi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada gambar berikut ini :



B. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Berdasarkan data kepegawaian Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017, Pegawai berjumlah 110 (Seratus Sepuluh) orang, dimana 109 (Seratus Sembilan) merupakan Pegawai Negeri Sipil aktif dan 1 (Satu) orang Pegawai Negeri Sipil titipan, dengan komposisi kepegawaian sesuai tabel berikut ini :

Tabel 1.1. Jumlah pegawai berdasarkan Golongan dan Gender

Gender	Golongan				Jumlah
	IV	III	II	I	
Pria	13	42	11	0	66
Wanita	6	32	6	0	44
Jumlah	19	74	17	0	110

Tabel 1.2. Jumlah pegawai berdasarkan eselon dan gender

Gender	Eselon					Non Eselon	Jumlah
	I	II	III	IV	V		
Pria	1	1	6	14	0	44	66
Wanita	0	0	0	10	0	34	44
Jumlah	1	1	6	24	0	78	110

Tabel 1.3. Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dan gender

Gender	Pendidikan											Jumlah
	S3	S2	S1	D.IV	SM	D.III	D.II	D.I	SLTA	SLTP	SD	
Pria	1	16	23	0	0	1	0	1	22	2	0	66
Wanita	0	5	22	0	0	1	0	0	16	0	0	44
Jumlah	1	21	45	0	0	2	0	1	38	2	0	110

Tabel 1.4. Jumlah pegawai berdasarkan DIKLATPIM dan gender

Gender	DIKLATPIM				Jumlah
	TK. I	TK. II	TK. III	TK. IV	
Pria	1	1	11	13	26
Wanita	0	0	3	7	10
Jumlah	1	1	14	20	36

Tabel 1.5. Jumlah pegawai berdasarkan Jabatan Fungsional Tertentu dan gender

Gender	JAPUNG Golongan				Jumlah
	IV	III	II	I	
Pria	0	2	4	0	6
Wanita	2	2	0	0	4
Jumlah	2	4	4	0	10

Selain Pegawai Negeri Sipil, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur juga mempunyai Tenaga Kontrak sebanyak 32 (Tiga Puluh Dua) orang, dimana sebanyak 30 (Tiga Puluh) orang pembiayaan berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sedangkan 2 (Dua) orang pembiayaan berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

C. Standar Operasional Prosedur

Standar Operasional Prosedur adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator teknis, administratif dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan. Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik telah menyusun, menetapkan dan

menerapkan standar operasional prosedur yang bersifat teknis dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur. Adapun SOP Dinas Perkebunan yang bersifat teknis sebanyak 70 (Tujuh Puluh) dengan flowchart SOP sebagaimana terlampir.

D. Visi Misi

Visi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur adalah :

"Terwujudnya perkebunan Yang Tangguh Untuk Mendukung Agroindustri dan Ekonomi Hijau"

Misi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur adalah :

1. Mendorong berkembangnya usaha perkebunan yang efisien, produktif dan mampu memberikan jaminan kehidupan masyarakat yang lebih baik.
2. Menumbuh kembangkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan perkebunan.
3. Mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya lahan dan kebun secara profesional dan lestari.
4. Meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia.

Dari jabaran Visi dan Misi diatas dapat diperoleh gambaran kebijakan pembangunan sub sektor Perkebunan yaitu :

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan struktur ekonomi secara seimbang antara sektor-sektor ekonomi yang padat modal (capital Intensif) dan sektor ekonomi yang padat kerja (labour intensif) dengan memacu sektor-sektor ekonomi yang potensial.

2. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang baru yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah disesuaikan dengan keunggulan komparatif daerah.
3. Membangun sektor perkebunan yang tangguh dengan mengembangkan keunggulan komparatif (comparative advantages) dan keunggulan kompetitif (competitif advantages) yang berbasis agroindustri.
4. Mengembangkan sektor industri kecil dan menengah yang dapat menghasilkan barang setengah jadi sebagai upaya untuk mendorong berkembangnya industri hulu hilir melalui cara-cara :
 - a. peningkatan sistem pemasaran hasil produksi perkebunan;
 - b. penerapan teknologi pengolahan hasil produk perkebunan;
 - c. pemberdayaan penyuluh lapangan.

E. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi adalah rangkaian cara atau langkah-langkah yang berisikan program- program indikatif dalam rangka meningkatkan persentase keberhasilan pencapaian pembangunan daerah baik secara umum maupun sektoral. Strategi merupakan kesatuan rencana yang umum, luas, dan terintegrasi yang menghubungkan antara sumber daya, potensi, program kerja, dan permasalahan yang menghadang dalam rangka mewujudkan cita-cita pemerintah daerah untuk menyejahterakan masyarakatnya. Strategis harus bersifat incremental (terus meningkat) serta taktis terhadap ruang lingkup yang terbatas dan periode waktu dalam pencapaian tujuan. Sedangkan rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai dengan tindak lanjut berupa penyusunan serangkaian kebijakan yang tepat.

Kebijakan merupakan suatu bentuk, hasil, produk, atau fungsi dari suatu kesepahaman melalui analisis panjang terkait rumusan, rincian, penjelasan, maupun penilaian atas suatu permasalahan pembangunan daerah yang dikelola sedemikian rupa sehingga menghasilkan tahapan-tahapan dalam pelaksanaan program/kegiatan. Kebijakan yang akan diambil memberikan arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program/kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Kebijakan dapat bersifat internal yang berarti kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yang memiliki fokus kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong, dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran pembangunan subsektor perkebunan, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur menyusun strategi dalam mengaplikasikan setiap program/kegiatan pembangunan daerah khususnya subsektor perkebunan. Berikut strategi dan kebijakan Dinas Perkebunan dalam Renstra tahun 2013-2018:

Strategi 1: Peningkatan produksi perkebunan

Provinsi Kalimantan Timur memiliki beberapa komoditas perkebunan yang efektif sebagai lokomotif perkembangan perekonomian sekaligus “jalan” dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat terutama petani. Komoditas utama perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur antara lain kelapa sawit, kakao, karet, kelapa dalam, dan lada. Meskipun begitu, kajian-kajian untuk penambahan komoditas unggulan terus dilaksanakan karena peningkatan hasil produksi pertanian (perkebunan pada khususnya) akan diperhitungkan dalam peningkatan ekonomi berkelanjutan. Selain karena merupakan sumber daya alam yang

terbaharukan, hasil produksi perkebunan dapat dijual secara “mentah” maupun dijual dengan nilai tambah (pengolahan menjadi barang setengah jadi atau barang jadi).

Dalam merealisasikan strategi tersebut, Renstra Dinas Perkebunan mempunyai kebijakan sebagai berikut:

- ✓ Meningkatkan produktivitas komoditi perkebunan;
- ✓ Meningkatkan luas areal perkebunan;
- ✓ Pengembangan data/informasi dan pengendalian pembangunan perkebunan; dan
- ✓ Penurunan tingkat gangguan usaha dan konflik perkebunan.

Strategi 2: Pembinaan kelompok-kelompok usaha penghasil produk

Hasil perkebunan yang melimpah dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha kecil menengah untuk memberikan nilai tambah pada produk mentah sehingga memiliki nilai tambah/nilai jual tinggi ketika “dilempar” ke pasar. Dinas perkebunan mempunyai strategi untuk membina kelompok-kelompok usaha berskala kecil dan menengah untuk mengolah hasil perkebunan menjadi barang yang lebih bermanfaat dan berdaya saing melalui penyediaan sarana dan prasarana maupun pendampingan dalam pengembangan industri berbasis rumah tangga. Pembinaan kelompok-kelompok usaha akan menjadi penggerak industri pengolahan mikro/kecil sekaligus menjadi upaya menciptakan produk unggulan dari hasil perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.

- ✓ Penyediaan teknologi budidaya, panen, pasca panen, dan pengolahan hasil;
- ✓ Penerapan dan pelatihan teknologi budidaya yang baik dan benar;

- ✓ Peningkatan kualitas produk hasil perkebunan hingga masuk kualifikasi SNI; dan
- ✓ Pengembangan produk-produk perkebunan unggulan daerah.

Strategi 3: Peningkatan proses pengolahan komoditas perkebunan

Sebagian besar hasil perkebunan dijual secara mentah karena banyak dari masyarakat pertanian yang belum mengetahui cara pengolahan hasil perkebunan. Seperti komoditas kakao, oleh pekebun, kakao diambil bijinya untuk dikeringkan kemudian langsung dijual ke penadah, padahal biji kakao bisa diolah sendiri oleh petani untuk meningkatkan nilai jual hasil olahan biji kakao.

Penting adanya peran Dinas Perkebunan untuk memberikan sosialisasi dan menyediakan sarana pengembangan teknologi pengolahan komoditas merupakan strategi yang tepat sasaran dalam mengatasi permasalahan tersebut. Dengan adanya peningkatan nilai tambah di setiap komoditas perkebunan, diharapkan kesejahteraan pekebun dapat meningkat seiring bertambahnya pendapatan dari subsector perkebunan.

Dalam merealisasikan strategi tersebut, Renstra Dinas Perkebunan mempunyai kebijakan sebagai berikut:

- ✓ Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana teknologi pengolahan perkebunan;
- ✓ Pengembangan sector perkebunan dengan teknologi pengolahan produk perkebunan; dan
- ✓ Pengembangan jenis hasil produk perkebunan primer menjadi produk sekunder.

Strategi 4: Penguatan/optimalisasi kelembagaan petani dan kemitraan pemasaran komoditi

Minimnya pengetahuan petani perkebunan terhadap segala macam informasi terkait perkembangan teknologi, keterampilan berkebun, hingga pemasaran hasil panen membuat kerugian tersendiri bagi pekebun dalam meningkatkan kualitas hidupnya. Seperti pada kasus penjualan hasil panen produk mentah perkebunan kepada penadah tanpa mengetahui harga komoditas perkebunan di pasaran. Hal tersebut menyebabkan pekebun dapat dirugikan karena harga yang ditawarkan penadah jauh di bawah harga pasar. Oleh sebab itu penting adanya suatu organisasi atau kelembagaan yang menaungi petani secara umum dan pekebun secara khusus dalam mengelola hasil pertanian dari hulu ke hilir. Dalam merealisasikan strategi tersebut, Renstra Dinas Perkebunan mempunyai kebijakan sebagai berikut:

- ✓ Penguatan dan pengembangan kelembagaan dan asosiasi petani/pekebun;
- ✓ Peningkatan kemandirian kelompok petani/pekebun/gapoktan;
- ✓ Peningkatan kemitraan kelompok tani; dan
- ✓ Peningkatan kapasitas koperasi sekunder pertanian.

Strategi 5: Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia aparatur fungsional teknis perkebunan

Wilayah perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur tidak terdapat di satu daerah saja, tetapi tersebar di berbagai penjuru wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Fungsi pengawasan dan pengarahan kepada petani perkebunan harus dilakukan secara merata dan kontinyu agar peningkatan kualitas perkebunan tetap terjaga. Untuk melaksanakan tugas dalam fungsi pengawasan dan

pengarahan, Dinas perkebunan memerlukan sumber daya manusia yang menguasai teknis fungsional perkebunan secara kualitas maupun kuantitas sehingga pemerataan aparatur fungsional di setiap titik perkebunan dapat terjangkau.

Dalam merealisasikan strategi tersebut, Renstra Dinas Perkebunan mempunyai kebijakan sebagai berikut:

- ✓ Pengadaan rekrutmen dan pelatihan aparatur fungsional teknis perkebunan; dan
- ✓ Peningkatan pembangunan infrastruktur akses ke kawasan perkebunan.

Strategi 6 : Penerapan prinsip-prinsip perkebunan yang ramah lingkungan

Dalam rangka mengantisipasi isu strategis terkait lingkungan hidup, penerapan prinsip-prinsip perkebunan yang berkelanjutan menjadi poin penting dalam pelaksanaan pembangunan subsektor perkebunan. Pengelolaan perkebunan dari awal penanaman hingga pasca panen harus memenuhi syarat mutlak berupa ramah lingkungan. Oleh karena itu, dalam mengaplikasikan strategi tersebut, Dinas Perkebunan akan membuat langkah-langkah langsung seperti penggunaan pupuk alami dan mengurangi penggunaan pupuk buatan pabrik/kimia (yang mengakibatkan residu tanah dan mengurangi kualitas unsur hara pada tanah). Selain itu, Dinas Perkebunan akan memonitoring industri pengolahan hasil perkebunan dimana pengolahan harus sesuai dengan prinsip-prinsip agroindustri yang ramah lingkungan.

Dalam merealisasikan strategi tersebut, Renstra Dinas Perkebunan mempunyai kebijakan sebagai berikut:

- Pencegahan dan pengurangan emisi limbah perkebunan;
- Pengendalian hama terpadu perkebunan rakyat; dan
- Penyuluhan dan pengembangan riset tentang pembangunan perkebunan yang ramah lingkungan.

BAB II PROGRAM DAN KEGIATAN

1. Program dan Kegiatan Kerja

Untuk menunjang pelaksanaan program pembangunan perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur telah dibuat Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2013 – 2018 beserta target-target yang ingin dicapai setiap tahunnya yang dijabarkan dalam berbagai bentuk kegiatan-kegiatan baik yang dibiayai oleh APBN/BLN, APBD I dan APBD II, dimana dari tahun ketahun mengalami peningkatan anggaran yang cukup berarti untuk menunjang pelaksanaan pembangunan perkebunan tersebut. Pada tahun 2017, program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari :
 - Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri dari :
 - Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana
- c. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan, terdiri dari :
 - Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah
 - Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- d. Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan, terdiri dari :
 - Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran
 - Kegiatan Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
- e. Program Penanganan Konflik dan Gangguan Usaha Perkebunan, terdiri dari :
 - Kegiatan Penanganan Konflik Usaha Perkebunan
- f. Program Peningkatan Mutu Hasil Perkebunan, terdiri dari :
 - Kegiatan Pembinaan pasca panen

- g. Program Peningkatan Teknologi Terapan Perkebunan, terdiri dari :
 - Kegiatan Pengolahan Hasil Perkebunan
- h. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan, terdiri dari :
 - Kegiatan Promosi Produksi perkebunan
- i. Program Perluasan Komoditas Perkebunan Non Sawit, terdiri dari :
 - Kegiatan Ekstensifikasi Penanaman Baru Komoditi Perkebunan
- j. Program Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca, terdiri dari :
 - Kegiatan Pengembangan Energi Baru Terbarukan di Sektor Perkebunan
- k. Program Konservasi Lahan dan Air, terdiri dari :
 - Kegiatan Perlindungan Sumber Air di Areal Perkebunan
- l. Program Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perkebunan, terdiri dari :
 - Kegiatan Pengembangan Database Usaha Perkebunan
 - Kegiatan Pelayanan Administrasi Perijinan
- m. Program Peningkatan Kemitraan Perkebunan, terdiri dari :
 - Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Kebun Kemitraan
- n. Program Pengujian dan Sertifikasi Benih, terdiri dari :
 - Kegiatan Sertifikasi Benih
- o. Program Pengendalian OPT
 - Identifikasi dan Pengendalian OPT Perkebunan
- p. Program Pengembangan Bio Pestisida dan Agens Pengendali Hayati (APH)
 - Pengembangan dan Perbanyak Agens Pengendali Hayati (APH)
- q. Program Penyediaan Bahan Tanaman
 - Perbanyak Bahan Tanaman Perkebunan

2. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Sesuai dengan amanat Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, SPM diterapkan pada Urusan Wajib Daerah terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar, baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pilihan dimana penilaian akan Satuan Kerja Perangkat Daerah didasarkan pada pencapaian kinerja program dan kegiatan. Adapun capaian kinerja program dan kegiatan berdasarkan evaluasi rencana kerja sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Berdasarkan Evaluasi Rencana Kerja

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2017		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2017 (%)	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2				3	4	5		6		7	
	2	02			PERTANIAN							
1	1	03	07		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya administrasi perkantoran (%)	100	3.017.712.000		2.879.764.825		
	1	03	07	01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)	12	3.017.712.000	12	2.879.764.825	100,00	95,43
											100,00	95,43
Predikat kinerja											ST	ST
2	1	03	08		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur (%)	100	1.231.930.000		1.002.297.134		
	1	03	08	01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah peralatan dan kelengkapan kantor (Unit)	-			-		
	1	03	08	02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan dan kelengkapan sarana dan prasarana (Bulan)	12	1.231.930.000	12	1.002.297.134	100,00	81,36
						luas bangunan yang direhab (M2)						
Rata-rata capaian kinerja (%)											100,00	81,36
Predikat kinerja											ST	T

1	2				3	4	5		6		7	
3	1	03	09		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan pemerintah daerah (%)	100	1.385.593.000		1.369.564.513		
	1	03	09	01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (Kegiatan)	4	1.376.593.000	4	1.360.564.513	100,00	98,84
						Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah (Kegiatan)	4		4		100,00	
						Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman (Bulan)	12		12		100,00	
	1	03	09	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek (Orang)	2	9.000.000	2	9.000.000	100,00	100,00
						Jumlah pakaian dinas (Stell)						
Rata-rata capaian kinerja (%)											100,00	99,42
Predikat kinerja											ST	ST
4	1	03	10		Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya kinerja instansi pemerintah (%)	80	401.600.000		391.006.095		
	1	03	10	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran (Dokumen)	10	210.800.000	10	209.383.400	100,00	99,33
	1	03	10	02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	jumlah laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan (Dokumen)	4	190.800.000	4	181.622.695	100,00	95,19
Rata-rata capaian kinerja (%)											100,00	97,26
Predikat kinerja											ST	ST
6	1	03	60		Program Penanganan Konflik dan Gangguan Usaha Perkebunan	Persentase konflik yang ditangani (%)	20	55.500.000		55.447.000		
	1	03	60	04	Penanganan konflik usaha perkebunan	Persentase konflik yang ditangani (%)	20	55.500.000	43	55.447.000	212,50	99,90
Rata-rata capaian kinerja (%)											212,50	99,90
Predikat kinerja											ST	ST
7	1	03	61		Program Peningkatan Mutu Hasil Perkebunan	Persentase Produk yang bersertifikat (%)	30	82.900.000		82.893.002		
	1	03	61	01	Standarisasi mutu hasil perkebunan	Jumlah produk olahan yang disertifikasi (produk)	-	-	-	-		
	1	03	61	02	Pembinaan pasca panen	Jumlah kelompok tani yang dibina (Kel. Tani)	30	82.900.000	32	82.893.002	106,67	99,99
						a.Karet						
						b.Kelapa						
						c.Kakao						
						d.Lada						
						e.Aren						
Rata-rata capaian kinerja (%)											106,67	99,99
Predikat kinerja											ST	ST

1	2				3	4	5		6		7	
8	1	03	62		Program Peningkatan Teknologi Terapan Perkebunan	Jumlah komoditi produk olahan hasil perkebunan (Komoditi)	5	78.430.000		77.224.731		
	1	03	62	04	Penerapan teknologi pengolahan hasil perkebunan	Jumlah jenis olahan hasil perkebunan (Jenis)	-	-	-	-		
	1	03	62	05	Pengolahan hasil perkebunan	Jumlah produk olahan hasil perkebunan (Produk)	21	78.430.000	21	77.224.731	100,00	98,46
Rata-rata capaian kinerja (%)											100,00	98,46
Predikat kinerja											ST	ST
9	1	03	65		Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan	Jumlah komoditi perkebunan yang dipasarkan melalui kegiatan pameran dagang (Komoditi)	5	103.700.000		103.621.494		
	1	03	65	05	Promosi produksi perkebunan	Jumlah transaksi (Transaksi)	50	103.700.000	69	103.621.494	138,00	99,92
	1	03	65	06	Pengelolaan Informasi pasar	Jumlah data Informasi produk dan pasar (Informasi)	-	-	-	-		
Rata-rata capaian kinerja (%)											138,00	99,92
Predikat kinerja											ST	ST
12	1	03	74		Program Perluasan Komoditas Perkebunan Non Sawit	Luas areal komoditas unggulan perkebunan (Ha)	144.297	458.400.000		434.205.059		
						a. Karet	123.740					
						b. Kakao	9.496					
						c. Lada	11.061					
	1	03	74	01	Ekstensifikasi Penanaman Baru Komoditi Perkebunan	Peningkatan luas Kebun Non Sawit (Ha)	20	458.400.000	20	434.205.059	100,00	94,72
						a.Karet	20					
						b.Lada	-					
						c.Kakao	-					
Rata-rata capaian kinerja (%)											100,00	94,72
Predikat kinerja											ST	ST
13	1	03	76		Program Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca	Persentase emisi yang diturunkan dari BAU (%)	25	49.000.000		48.538.000		
	1	03	76	01	Pengembangan energi baru terbarukan di sektor perkebunan	Jumlah Perusahaan yang mengembangkan bio energi (PMS)	6	49.000.000	6	48.538.000	100,00	99,06
	1	03	76	02	Penerapan kebijakan prinsip-prinsip perkebunan berkelanjutan	Jumlah PBS dan petani yang menerapkan prinsip-prinsip ramah lingkungan (PBS/ISPO dan Kel. Tani)	-	-	-	-		
						a.PBS/ISPO						
						b.Petani						
Rata-rata capaian kinerja (%)											100,00	99,06
Predikat kinerja											ST	ST

1	2				3	4	5		6		7	
14	1	03	77		Program Konservasi Lahan dan Air	Persentase sumber air dan HCV yang terlindungi (%)	50	73.000.000		72.083.400		
	1	03	77	01	Perlindungan lahan perkebunan	Jumlah perusahaan yang memiliki kawasan HCV (PBS)	-	-	-	-		
	1	03	77	02	Perlindungan sumber air di areal perkebunan	Jumlah sumber air yang dilindungi (Unit)	125	73.000.000	155	72.083.400	124,00	98,74
						a. Embung	75					
						b. Biopori	50					
						c. Drainase	-					
Rata-rata capaian kinerja (%)											124,00	98,74
Predikat kinerja											ST	ST
17	1	03	80		Program Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perkebunan	Jumlah perusahaan yang dibina dan diawasi (Perusahaan)	50	155.000.000		151.796.014		
	1	03	80	01	Pengembangan Database Usaha Perkebunan	Jumlah database dan data spasial (Database)	2	86.000.000	2	82.932.840	100,00	96,43
	1	03	80	02	Pelayanan administrasi Perijinan	Jumlah perusahaan yang memperoleh IUP (Perusahaan)	50	69.000.000	7	68.863.174	14,00	99,80
	1	03	80	03	Pengawasan dan Evaluasi Usaha Perkebunan	Jumlah usaha perkebunan yang diawasi (Perusahaan)	-	-	-	-		
Rata-rata capaian kinerja (%)											57,00	98,12
Predikat kinerja											R	ST
18	1	03	81		Program Peningkatan Kemitraan Perkebunan	Jumlah lembaga pekebun yang bermitra (Kelompok)	20	55.000.000		54.916.310		
	1	03	81	01	Pembinaan dan pengawasan kebun kemitraan	Jumlah kemitraan usaha perkebunan (Kelompok)	20	55.000.000	21	54.916.310	105,00	99,85
Rata-rata capaian kinerja (%)											105,00	99,85
Predikat kinerja											ST	ST
19	1	03	82		Program Peningkatan Nilai Tambah Produk Perkebunan	Jumlah olahan produk hasil perkebunan (Komoditi)	5	64.900.000		64.813.906		
	1	3	82	01	Pembinaan pengolahan produk perkebunan	Jumlah kelompok tani yang dibina (Kel. Tani)	25	64.900.000	25	64.813.906	100,00	99,87
						a. Karet						
						b. Kelapa						
						c. Kakao						
						d. Lada						
	1	3	82	02	Pemanfaatan alat-alat pengolahan hasil perkebunan	Persentase peningkatan produksi (%)	-	-	-	-		
Rata-rata capaian kinerja (%)											100,00	99,87
Predikat kinerja											ST	ST
20	1	03	83		Program Pengendalian Kebakaran Kebun	Persentase kebakaran kebun yang dikendalikan (%)	90	84.000.000		83.937.500		
					Pengendalian kebakaran kebun dan dampak perubahan iklim	Luas kebakaran kebun (Ha)	99	84.000.000	12	83.937.500	12,12	99,93
Rata-rata capaian kinerja (%)											12,12	99,93
Predikat kinerja											SR	ST

1	2				3	4	5		6		7	
21	1	3	84		Program Pengawasan Peredaran benih perkebunan	Jumlah penanganan kasus peredaran benih ilegal (Kasus)	3	125.550.000		125.456.022		
					Identifikasi sumber benih	Jumlah sumber benih yang legal (Sumber Benih)	-	-	-	-		
					Pengawasan peredaran benih	Jumlah benih yang diawasi (Benih)	20.000.000	25.550.000	3.742.950	125.456.022	18,71	99,93
Rata-rata capaian kinerja (%)											18,71	99,93
Predikat kinerja											SR	ST
22	1	3	85		Program pengujian dan sertifikasi benih	Jumlah benih yang disertifikasi (Benih)	5.000.000	134.000.000		133.564.300		
					Pengujian benih	Jumlah jenis benih yang diuji di laboratorium (Karet, Aren, Lada, Kakao, Kelapa) (Jenis)	-	-	-	-		
					Sertifikasi benih	Jumlah sertifikat yang diterbitkan (Lembar)	150	134.000.000	280	133.564.300	186,67	99,67
Rata-rata capaian kinerja (%)											186,67	99,67
Predikat kinerja											ST	ST
23					Program Pengendalian OPT	Jumlah kelompok tani dan brigade proteksi yang mengendalikan OPT (Kelompok)	30	88.800.000		84.235.000		
					Identifikasi dan Pengendalian OPT Perkebunan	Jumlah kelompok tani OPT (Kel. Tani)	25	88.800.000	8	84.235.000	32,00	94,86
					Operasional brigade proteksi perkebunan	Jumlah regu proteksi perkebunan (Regu)	-	-	-	-		
Rata-rata capaian kinerja (%)											32,00	94,86
Predikat kinerja											SR	ST
24					Program Pengembangan Bio Pestisida dan Agens Pengendali Hayati (APH)	Jumlah Bio Pestisida dan Agens Pengendali Hayati (APH) (Kg)	2.500	596.975.000		585.903.943		
					Pengembangan dan Perbanyakan Agens Pengendali Hayati (APH)	Jumlah APH yang diperbanyak (Kg): Trichoderma Metarhizium Beauveria, sp	2.500	596.975.000	10.400	585.903.943	83,20	98,15
					Uji terap aplikasi Agens Pengendali Hayati, Bio Pestisida dan Pestisida Kimia	Jumlah uji APH, Bio pestisida dan pestisida kimia (Kali): APH Bio Pestisida Pestisida Kimia	-	-	-	-		
Rata-rata capaian kinerja (%)											83,20	98,15
Predikat kinerja											T	ST
25					Program penyediaan bahan tanaman	Jumlah komoditas perkebunan (Komoditi)	5	461.010.000		455.045.000		
					Perbanyakan Bahan Tanaman Perkebunan	Jumlah benih komoditas perkebunan (Benih)	35.000	461.010.000	35.000	455.045.000	100,00	98,71
					Pengelolaan Kebun Induk/Koleksi dan Blok Penghasil Tinggi (BPT)	Jumlah kebun induk/koleksi dan BPT yang dipelihara (Ha)	-	-	-	-		
Rata-rata capaian kinerja (%)											100,00	98,71
Predikat kinerja											ST	ST
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM											98,79	97,67
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM											ST	ST

Berdasarkan hasil evaluasi rencana kerja, predikat kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur rata-rata Sangat Tinggi dan selama pelaksanaan program dan kegiatan tidak mengalami permasalahan.

Selain evaluasi rencana kerja, kinerja Dinas Perkebunan juga dilihat dari keberhasilan mencapai target yang tercantum di dalam Indikator Kinerja Utama (IKU). Definisi indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan

Tabel 2.2. Capaian Indikator Kinerja Utama SKPD

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017		
			Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya produksi komoditi perkebunan kelapa sawit, karet, kakao, kelapa dalam, lada	Jumlah produksi :				
	- Kelapa Sawit	Ton/Tahun	14.832.500	13.603.078	91,71
	- Karet	Ton/Tahun	85.738	62.912	73,38
	- Kakao	Ton/Tahun	4.148	2.132	51,40
	- Kelapa dalam	Ton/Tahun	13.457	10.490	77,95
	- Lada	Ton/Tahun	8.364	4.260	50,93
RATA-RATA CAPAIAN					69,07

Pada tahun 2017, rata-rata capaian kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur hanya mencapai 69,07 %. Capaian yang paling rendah adalah produksi komoditi lada sebesar 50,93 %, sedangkan capaian yang paling tinggi adalah komoditi kelapa sawit sebesar 91,71%. Faktor-faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target antara lain, faktor cuaca, jumlah tanaman menghasilkan, serangan penyakit dan faktor harga komoditi.

3. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Pada tahun 2017, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur mendapat alokasi dana APBD sebesar Rp. 25.121.598.000,- dan realisasi hingga akhir 2016 adalah sebesar Rp. 22.154.551.383,- atau 88,19 %, sebagaimana tertera di tabel berikut ini :

Tabel 2.3. Rincian APBD dan Realisasi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017

NO	Program / Kegiatan	Anggaran		
		Alokasi	Realisasi	%
1	2	3	4	5
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	16.418.598.000	13.898.238.135	84,65
II	BELANJA LANGSUNG	8.703.000.000	8.256.313.248	94,87
	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.017.712.000	2.879.764.825	95,43
	- Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	3.017.712.000	2.879.764.825	95,43
	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.231.930.000	1.002.297.134	81,36
	- Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	1.231.930.000	1.002.297.134	81,36
	3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	1.385.593.000	1.369.564.513	98,84
	- Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	1.376.593.000	1.360.564.513	98,84
	- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	9.000.000	9.000.000	100,00
	4. Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	401.600.000	391.006.095	97,36
	- Penyusunan Dokumen dan Perencanaan Anggaran	210.800.000	209.383.400	99,33
	- Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	190.800.000	181.622.695	95,19
	5. Program Perluasan Komoditas Perkebunan Non Sawit	458.400.000	434.205.059	94,72
	- Ekstensifikasi Penanaman Baru Komoditi Perkebunan	458.400.000	434.205.059	94,72
	6. Program Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perkebunan	155.000.000	151.796.014	97,93
	- Pengembangan Database Usaha Perkebunan	86.000.000	82.932.840	96,43
	- Pelayanan Administrasi Perijinan	69.000.000	68.863.174	99,80
	7. Program Penanganan Konflik dan Gangguan Usaha Perkebunan	55.500.000	55.447.000	99,90
	- Penanganan Konflik Usaha Perkebunan	55.500.000	55.447.000	99,90
	8. Program Peningkatan Kemitraan Perkebunan	55.000.000	54.916.310	99,85
	- Pembinaan dan Pengawasan Kebun Kemitraan	55.000.000	54.916.310	99,85
	9. Program Peningkatan Mutu Hasil Perkebunan	82.900.000	82.893.002	99,99
	- Pembinaan pasca panen	82.900.000	82.893.002	99,99
	10. Program Peningkatan Nilai Tambah Produk Perkebunan	64.900.000	64.813.906	99,87
	- Pembinaan Pengolahan Produk Perkebunan	64.900.000	64.813.906	99,87
	11. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan	103.700.000	103.621.494	99,92
	- Promosi Produksi Perkebunan	103.700.000	103.621.494	99,92
	12. Program Pengendalian Kebakaran Kebun	84.000.000	83.937.500	99,93
	- Pengendalian Kebakaran Kebun dan Dampak Perubahan Iklim	84.000.000	83.937.500	99,93
	13. Program Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca	49.000.000	48.538.000	99,06
	- Pengembangan Energi Baru Terbarukan di Sektor Perkebunan	49.000.000	48.538.000	99,06
	14. Program Konservasi Lahan dan Air	73.000.000	72.083.400	98,74
	- Perlindungan Sumber air di Areal Perkebunan	73.000.000	72.083.400	98,74
	15. Program Pengawasan dan Peredaran Benih Perkebunan	125.550.000	125.456.022	99,93
	- Pengawasan Peredaran Benih	125.550.000	125.456.022	99,93
	16. Program Pengujian dan Sertifikasi Benih	134.000.000	133.564.300	99,67
	- Sertifikasi Benih	134.000.000	133.564.300	99,67
	17. Program Pengendalian OPT	88.800.000	84.235.000	94,86
	- Identifikasi dan Pengendalian OPT Perkebunan	88.800.000	84.235.000	94,86
	18. Program Pengembangan Bio Pestisida dan Agens Pengendali Hayati (APH)	596.975.000	585.903.943	98,15
	- Pengembangan dan Perbanyak Agens Pengendali Hayati (APH)	596.975.000	585.903.943	98,15
	19. Program Penyediaan Bahan Tanaman	461.010.000	455.045.000	98,71
	- Perbanyak Bahan Tanaman Perkebunan	461.010.000	455.045.000	98,71
	20. Program Peningkatan Teknologi Terapan Perkebunan	78.430.000	77.224.731	98,46
	- Pengolahan Hasil Perkebunan	78.430.000	77.224.731	98,46
	JUMLAH BELANJA LANGSUNG + TDK LANGSUNG	25.121.598.000	22.154.551.383	88,19

4. Perencanaan Pembangunan

Sebagai salah satu komponen penting dalam perencanaan strategis, tujuan dapat dirumuskan sebagai gambaran tentang keadaan yang diinginkan atau dicita-citakan oleh Dinas Perkebunan selama kurun waktu lima tahun ke depan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya. Selain itu, tujuan Dinas Perkebunan merupakan sebuah upaya dalam mendukung pencapaian Program Pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur seperti yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2013-2018.

Adapun tujuan Rencana Strategis Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013-2018 dapat dirincikan sebagai berikut:

- 4.1. Misi Pertama adalah Meningkatkan Produksi Komoditi Perkebunan, yang mempunyai tujuan Meningkatkan produksi perkebunan,
- 4.2. Misi Kedua adalah Meningkatkan Kualitas dan Nilai Tambah Produk, yang mempunyai tujuan Meningkatkan produk berstandar nasional dan internasional dan Meningkatkan produk primer perkebunan menjadi bahan setengah jadi dan barang jadi.
- 4.3. Misi Ketiga adalah Menguatkan Aspek Kelembagaan dan Pemasaran, yang mempunyai tujuan Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan petani serta pemasaran dan Meningkatkan peran pembinaan aparatur.
- 4.4. Misi Keempat adalah Mengembangkan Perkebunan yang Berkelanjutan, yang mempunyai tujuan Meningkatkan penerapan prinsip-prinsip perkebunan yang ramah lingkungan.

Sasaran merupakan sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Perkebunan dalam periode lima tahun ke depan sesuai dengan penjabaran dari tujuan rencana strategis. Dari keenam tujuan Renstra Dinas Perkebunan, dapat dirumuskan turunan tujuan berupa sasaran-sasaran perencanaan pembangunan subsektor perkebunan yang efektif dan efisien serta memiliki indikator yang spesifik, jelas, dan terukur sebagai bahan evaluasi, monitoring, dan perencanaan pembangunan di masa yang akan datang. Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur periode 2013-2018 sebagai pendukung pembangunan daerah adalah sebagai berikut:

- 4.5. Tujuan pertama, "Meningkatkan produksi perkebunan" dapat dicapai dengan sasaran Meningkatnya produksi kelapa sawit, karet, kakao, kelapa dalam, dan lada, dengan indikator sebagai berikut:
- Jumlah produksi (ton per tahun) setiap komoditas,
 - Tingkat produktivitas (ton/hektar per tahun) setiap komoditas, dan
 - Penambahan luas kebun (hektar) setiap komoditas.
- 4.6. Tujuan kedua, "Meningkatkan produk berstandar nasional dan internasional" dapat dicapai dengan sasaran Meningkatnya produk berstandar nasional dan internasional, dengan indikator sebagai berikut:
- Persentase produk yang bersertifikasi (%).
- 4.7. Tujuan ketiga, "Meningkatkan produk primer perkebunan menjadi bahan setengah jadi dan barang jadi" dapat dicapai dengan sasaran Meningkatnya nilai tambah produk perkebunan, dengan indikator sebagai berikut
- Persentase penerapan teknologi ramah lingkungan (%).
- 4.8. Tujuan keempat, "Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan petani" dapat dicapai dengan sasaran Meningkatnya Kesejahteraan petani pekebun, dengan indikator sebagai berikut
- Jumlah dan kemandirian kelompok tani/gapoktan
- 4.9. Tujuan kelima, "Meningkatkan peran dan pembinaan aparatur" dapat dicapai dengan sasaran Meningkatnya ketersediaan tenaga fungsional dan teknis perkebunan, dengan indikator sebagai berikut:
- Jumlah tenaga teknis fungsional/tahun
- 4.10. Tujuan keenam, "Meningkatkan penerapan prinsip-prinsip perkebunan yang ramah lingkungan" dapat dicapai dengan sasaran Menurunnya gas emisi rumah kaca subsektor perkebunan, dengan indikator Jumlah kegiatan yang dapat menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) pertahun. Sasaran kedua adalah Meningkatnya jumlah perusahaan perkebunan yang menerapkan prinsip-prinsip perkebunan yang berkelanjutan, diantaranya menerapkan

ISPO/RSPO, dengan indikator Jumlah dan luas areal perusahaan perkebunan yang menerapkan ISPO/RSPO.

5. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana merupakan alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan di dalam pencapaian kinerja setiap instansi. Sarana dan Prasarana yang tersedia di Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur meliputi Tanah, Bangunan dan Gedung, Peralatan dan Mesin, Jalan Irigasi dan Pengairan, serta sarana dan prasarana lainnya. Sarana dan Prasarana yang tersedia di Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat dalam Buku Inventaris Barang dan dalam neraca Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, sarana dan prasarana termasuk dalam kategori aset tetap.

6. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan pembangunan perkebunan di wilayah Kalimantan Timur tahun 2017 mengalami berbagai kendala, hambatan dan permasalahan baik yang bersifat teknis maupun non teknis. Adapun tantangan dan permasalahan yang dihadapi sebagai berikut :

- a. Masih rendahnya produktivitas perkebunan. Beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya produktivitas adalah kerentanan terhadap serangan hama dan penyakit serta usia tanaman.
- b. Mutu hasil perkebunan yang belum memenuhi standar.
- c. Masih beredarnya bibit sawit palsu (tidak bersertifikat) di perkebunan rakyat yang disebabkan oleh kurangnya pengetahuan petani pekebun terhadap bibit sawit palsu

Upaya Penyelesaian Masalah

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, maka langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Untuk meningkatkan produktivitas, Dinas Perkebunan melaksanakan program dan kegiatan yang outputnya adalah peningkatan produktivitas seperti, Program Perluasan Komoditas Perkebunan Non Sawit, Program Pengendalian OPT serta Program Pengembangan Bio Pestisida dan Agens Pengendali Hayati (APH)
- b. Memberikan pengetahuan kepada petani melalui pelatihan peningkatan mutu hasil agar memenuhi standarisasi.
- c. Mensosialisasikan kepada petani pekebun perbedaan antara bibit sawit asli dan bibit sawit palsu, sehingga petani pekebun memiliki pengetahuan yang memadai dan dapat memilih benih sawit dengan benar dan tepat sasaran.

BAB III

PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

1. Tugas Pembantuan yang diterima

A. Satuan Kerja 05

A.1. Dasar Hukum

Dasar hukum pemberian Tugas Pembantuan Satuan Kerja 05 kepada Provinsi Kalimantan Timur khususnya Dinas Perkebunan, adalah sebagai berikut :

- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015

A.2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Instansi pemberi Tugas Pembantuan Satuan Kerja 05 adalah Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia

A.3. Program dan Kegiatan

Adapun program Satuan Kerja 05 adalah Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Berkelanjutan dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. Pengembangan Tanaman Rempah dan Penyegar
- b. Dukungan Perlindungan Perkebunan
- c. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan
- d. Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah
- e. Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan
- f. Dukungan Perbenihan Tanaman Perkebunan

A.4. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1. Realisasi Output Kegiatan Satuan Kerja 05 Tahun 2017

KODE		TARGET OUTPUT		REALISASI OUTPUT	
1		3		4	
018.05.08	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan			-	-
	TUGAS PEMBANTUAN				
1777	Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar			-	-
1777.001	Pengembangan Tanaman Tahunan [Base Line]	100	Hektar	100	Hektar
1779	Dukungan Perlindungan Perkebunan				
1779.006	Fasilitasi Teknis Dukungan Perlindungan Perkebunan [Base Line]	12	Bulan	10	Bulan
1780	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan				
1780.005	Pelayanan dan Pembinaan Manajemen dan Teknis Lainnya [Base Line]	1	Dok	-	Dok
5888	Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah				
5888.002	Pengembangan Tanaman Rempah [Base Line]	300	Hektar	300	Hektar
5888.003	Pengembangan Tanaman Rempah [Base Line]	25	Hektar	-	Hektar
5888.004	Fasilitasi Teknis Dukungan Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah (Base Line)	12	Bulan	10	Bulan
5889	Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan				
5889.001	Pengembangan Pascapanen Komoditas Perkebunan (Base Line)	9	Kel. Tani	-	Kel. Tani
5890	Dukungan Perbenihan Tanaman Perkebunan				
5890.001	Penyediaan Benih Unggul Tanaman Perkebunan [Base Line]	14	Hektar	12	Hektar
5890.002	Fasilitasi Teknis Dukungan Penyediaan Benih Unggul Tanaman Perkebunan [Base Line]	12	Bulan	10	Bulan
	DANA DEKONSENTRASI				
1779	Dukungan Perlindungan Perkebunan				
1779.006	Fasilitasi Teknis Dukungan Perlindungan Perkebunan [Base Line]	12	Bulan	10	Bulan
1780	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan				
1780.005	Pelayanan dan Pembinaan Manajemen dan Teknis Lainnya [Base Line]	14	Dokumen	7	Dokumen

A.5. Sumber dan Jumlah Anggaran Yang Diberikan

Sumber dana Satuan Kerja 05 berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dengan Nomor : SP DIPA-018.05.3.169066/2016 dan SP DIPA-018.05.4.169114/2016 tanggal 7 Desember 2015. Adapun jumlah anggaran serta realisasi sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2. Anggaran dan Realisasi Satuan Kerja 05 Tahun 2017

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		PAGU	REALISASI	%
1	2	4	5	6
018.05.08 169066(DK)	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	707.535.000	610.173.250	86,24
1779	Dukungan Perlindungan Perkebunan	76.090.000	74.979.000	98,54
1779.006	Fasilitasi Teknis Dukungan Perlindungan Perkebunan [Base Line]	76.090.000	74.979.000	98,54
1780	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan	631.445.000	535.194.250	84,76
1780.005	Pelayanan dan Pembinaan Manajemen dan Teknis Lainnya [Base Line]	631.445.000	535.194.250	84,76
018.05.08 169144(TP)	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	7.168.872.000	5.384.083.950	75,10
1777	Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar	908.000.000	728.747.700	80,26
1777.001	Pengembangan Tanaman Tahunan [Base Line]	908.000.000	728.747.700	80,26
054	Peremajaan Tanaman Tahunan	848.000.000	688.750.000	81,22
059	Pengawasan, Pendampingan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan	848.000.000	688.750.000	81,22
1779	Dukungan Perlindungan Perkebunan	923.270.000	882.637.400	95,60
1779.006	Fasilitasi Teknis Dukungan Perlindungan Perkebunan [Base Line]	923.270.000	882.637.400	95,60
055	Pemberdayaan Petugas Pengamat OPT Tanaman Perkebunan	42.000.000	38.000.000	90,48
1780	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan	696.950.000	468.037.200	67,16
1780.005	Pelayanan dan Pembinaan Manajemen dan Teknis Lainnya [Base Line]	696.950.000	468.037.200	67,16
053	Administrasi Kegiatan Dana Tugas Pembantuan (TP)	143.000.000	141.282.200	98,80
054	Dukungan Kegiatan Manajemen dan Teknis Lainnya	553.950.000	326.755.000	58,99
5888	Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah	2.663.150.000	816.032.650	65,78
5888.002	Pengembangan Tanaman Rempah [Base Line]	1.079.000.000	816.032.650	75,63
053	Intensifikasi Tanaman Rempah (Lada, Pala, Cengkeh dan Rempah Lainnya)	879.000.000	656.000.000	74,63
055	Pemberdayaan Pekebun dan Penguatan Kelembagaan Tanaman Rempah	100.000.000	92.077.400	92,08
056	Pengawasan, Pendampingan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan	100.000.000	67.955.250	67,96
5888.003	Pengembangan Tanaman Rempah [Base Line]	655.125.000	31.711.900	4,84
053	Perluasan Tanaman Semusim dan Rempah di Lahan Kering (Base Line)	555.000.000	-	-
054	Pengawasan, Pendampingan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan	100.125.000	31.711.900	31,67

1	2	4	5	6
5888.004	<i>Fasilitasi Teknis Dukungan Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah (Base Line)</i>	929.025.000	904.088.800	97,32
060	<i>Dukungan Teknis Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah</i>	929.025.000	904.088.800	97,32
5890	Dukungan Perbenihan Tanaman Perkebunan	1.291.152.000	1.169.694.250	90,59
5890.001	<i>Penyediaan Benih Unggul Tanaman Perkebunan [Base Line]</i>	878.194.000	812.038.700	92,47
052	Pembangunan Kebun Sumber Benih Tanaman Perkebunan	695.478.000	656.141.000	94,34
054	Pemeliharaan, Penilaian, Pemurnian dan Penetapan Kebun Sumber Benih Tanaman Perkebunan	146.766.000	132.357.200	90,18
5890.002	<i>Fasilitasi Teknis Dukungan Penyediaan Benih Unggul Tanaman Perkebunan [Base Line]</i>	412.958.000	357.655.550	86,61
051	Fasilitasi Penilaian, Pelepasan, Penarikan dan Pengembangan Varietas Benih Tanaman Perkebunan	68.380.000	63.799.900	93,30
052	Fasilitasi Pembinaan, Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Benih Tanaman Perkebunan	118.380.000	88.717.800	74,94
053	Pembinaan Kelembagaan Usaha Produksi dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan	173.398.000	157.635.800	90,91
060	Dukungan Teknis Penyediaan Benih Tanaman Perkebunan	52.800.000	47.502.050	89,97
TOTAL DK + TP		7.876.407.000	5.994.257.200	76,10

A.6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

Pegawai Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur yang bertugas di Satuan Kerja 05 berjumlah 7 (tujuh) orang, berdasarkan :

- Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 902/04/V-BPKAD/2017 tanggal 19 Januari 2017 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara Dana Tugas Pembantuan Kementerian Pertanian Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perkebunan pada Satuan Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2017
- Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 902/05/V-BPKAD/2017 tanggal 19 Januari 2017 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara Dana Dekonsentrasi lingkup Kementerian Pertanian Republik Indonesia pada Satuan

Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur
Tahun Anggaran 2017

- c. Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 188.4/06/Kpts-Disbun/2017 tanggal 7 Pebruari 2017 tentang Struktur Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Pelaksanaan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan Satuan Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur (05) Tahun Anggaran 2017.

Tabel 3.3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

Gender	Pendidikan			Pangkat		
	S2	S1	SMA	IV	III	II
Pria	1	4	0	0	4	0
Wanita	0	1	1	1	1	1
Jumlah	1	5	1	1	5	1

A.7. Permasalahan dan Solusi

Pada tahun 2017, output perluasan tanaman lada seluas 25 Ha tidak tercapai yang disebabkan oleh waktu pelaksanaan yang sangat pendek dan ketersediaan benih lada yang bersertifikat.

2. Tugas Pembantuan yang diberikan

Pada tahun 2017, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur tidak memberikan tugas pembantuan kepada Kabupaten/Kota

BAB IV

TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

Dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi, pada tahun 2017 Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur melakukan kerjasama dengan mitra pembangunan sebagai berikut :

1. Kerjasama Pembelian dan Penyaluran Pupuk Non Subsidi Antara Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, Bankaltim dan PT. Pupuk Kalimantan Timur.

Dalam Kesepahaman Bersama Nomor : 119/1034/DISBUN/2017, Nomor : 059/D41300/II.2017, Nomor : 006/PRJ/BPD-PST/II/2017 tanggal 28 Pebruari 2017 dilakukan kerjasama dalam skema penyaluran kredit dari Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur untuk pembelian dan penyaluran pupuk non subsidi dari PT. Pupuk Kalimantan Timur untuk pekebun rakyat melalui kelompok tani dan koperasi perkebunan yang didasari oleh peraturan dan ketentuan yang berlaku, serta sebagai upaya untuk memperkenalkan produk kredit dan simpanan Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan produk pupuk Non Subsidi dari PT. Pupuk Kalimantan Timur di lingkungan Pekebun Rakyat di Provinsi Kalimantan Timur.

2. Kerjasama Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Rendah Emisi Antara Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dengan The Nature Conservancy.

Dalam Perjanjian Kerjasama Teknis Nomor : 199/2668/DISBUN/2017, Nomor : 005/DOC/TNC-IP/ITP/VI/2017 tanggal 12 Juni 2017 dilakukan untuk membangun kapasitas Aparatur Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dalam merencanakan pembangunan rendah emisi dan berkelanjutan di sektor perkebunan sawit sebagai bagian dari aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB V PENUTUP

Salah satu faktor pendukung penentu sukses dan tidaknya pelaksanaan kegiatan pengembangan 1 juta ha tahap kedua adalah faktor pendanaan. Jumlah anggaran yang diperoleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur setiap tahunnya akan berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan perkebunan baik dalam rangka pembinaan, pemeliharaan maupun pembukaan kebun baru.

Dari seluruh pencapaian program kerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur sepanjang Tahun 2017 dapat diambil kesimpulan bahwa pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur masih belum sepenuhnya merefleksikan dan sesuai dengan perencanaan jangka menengah (RKPD dan Renja SKPD), sehingga realisasi program/kegiatan belum dapat dicapai secara optimal.

Untuk peningkatan pencapaian hasil kegiatan dari program yang ada di tahun-tahun berikutnya disarankan agar pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan Dinas perkebunan Provinsi Kalimantan Timur hendaknya disesuaikan dengan perencanaan sebelumnya, sehingga realisasi kegiatan dapat dicapai secara optimal. Kegiatan yang tidak terprogram hendaknya terkoordinasi dengan baik antara unit-unit kerja terkait, sehingga tidak membebani anggaran belanja secara signifikan yang berakibat kepada penggeseran anggaran atau kegiatan.

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017**

PROVINSI : KALIMANTAN TIMUR
NAMA OPD : DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : URUSAN PILIHAN

NO.	ASPEK	FOKUS	NO.	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh OPD 1. Peningkatan Ketahanan Pangan	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh OPD : 1. Peningkatan Ketahanan Pangan	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh OPD (1 program) / jumlah program Nasional (1) x 100%	- Jumlah program Nasional (RKP) sebanyak 1 program - Jumlah program nasional yang dilaksanakan OPD, sebanyak 1 program x 100%	100%	
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada	Sebanyak 70 SOP antara lain : SOP tentang Identifikasi Komoditi 1. Perkebunan SOP tentang Peremajaan Komoditi 2. Perkebunan SOP tentang Rehabilitasi Tanaman 3. Perkebunan SOP tentang Pembangunan Kebun Induk 4. Komoditi Perkebunan SOP tentang kegiatan Perlindungan lahan perkebunan 5. SOP tentang kegiatan perlindungan sumber air dan mineral 6. SOP tentang Proses Identifikasi, 7. Inventarisasi SAPRAS dan SDM Karlabun SOP tentang Proses Mengidentifikasi dan Mengukur Mitigasi Emisi GRK pada usaha perkebunan 8. 9. SOP tentang Penilaian Fisik Kebun 10. SOP tentang Perizinan Usaha Perkebunan	70 (Tujuh Puluh) SOP	SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh setiap pejabat atau pegawai dalam suatu kegiatan yang harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang Data Pendukung : Fotocopy SK SOP
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan OPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yg ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	- PERDA pelaksana sebanyak 2 - PERDA yang seharusnya, sebanyak 2	Ada	Data Pendukung : Fotocopy Perda
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan Sesuai PERDA Prov. Kaltim No. 08 Tahun 2008	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi (jumlah eselon yang terisi = 33 eselon	Jumlah jabatan yang ada (33) di bagi jumlah jabatan yang ada (33) x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 32 - jabatan yang harus ada, sebanyak 33	97%	Data Pendukung : Daftar Urut Kepangkatan
			5	Ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi OPD	Ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi OPD	1. Fungsional PBT Madya UPTD PBP 2. Fungsional PBT Pertama 3. Fungsional Pengendali OPT Penyelia 4. Fungsional Pengendali OPT Pertama 6. Fungsional PBT Pelaksana 7. Fungsional Calon Pengendali OPT 9. Fungs. Pengawas Mutu Hasil Pertanian	Ada	Data Pendukung : Daftar Urut Kepangkatan

NO.	ASPEK	FOKUS	NO.	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas OPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Jumlah PNS Provinsi 11566 orang	Jumlah PNS OPD (110 orang)	- PNS OPD, sebanyak 110 personil - Total PNS Provinsi, sebanyak 11.566 orang	0.95%	Data Pendukung : Daftar Urut Kepangkatan
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat OPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 30 orang - Pejabat yang ada, sebanyak 32 org	94%	Data Pendukung : Daftar Urut Kepangkatan
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi jumlah total pejabat OPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 32 orang - Jabatan yang ada, sebanyak 32 jbt	100%	Data Pendukung : Daftar Urut Kepangkatan
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh OPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di OPD - RENSTRA OPD - RENJA OPD - RKA OPD - DPA OPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan OPD berikut jumlahnya	Ada Dokumen yang ada tahun 2017, sebanyak 4 jenis, yang terdiri dari : 1. Dokumen Renstra OPD 2013-2018 2. Dokumen Renja 2017 3. Dokumen RKA-OPD 2017 4. Dokumen DPA-OPD 2017	4 jenis dokumen	
		Sinkronisasi Program Renja OPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD (17 prog) yang diakomodir dalam RENJA OPD	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA OPD dibagi jumlah program dalam RENJA OPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Program RKPD yang diakomodir dlm Renja OPD, sebanyak 17 program - Program Renja OPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 17 program	100%	Mengacu dokumen RKPD tahun 2017 dan Renja OPD ybs
		Sinkronisasi program RKA OPD dengan program RENJA OPD	11	Jumlah program Renja RKPD yang diakomodir dalam RKA OPD (17 program)	Jumlah program Renja OPD yang diakomodir dalam RKA OPD dibagi jumlah program dalam RKA OPD x 100%	- Program RENJA OPD yang diakomodir dalam RKA OPD, sebanyak 17 program - Program dalam RKA OPD, sebanyak 17 program	100%	Mengacu dokumen RKPD tahun 2017 dan Renja OPD ybs
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program Renja OPD (17 prog) diakomodir dalam DPA OPD	Jumlah Program RENJA OPD yg diakomodir dalam DPA OPD di bagi jumlah program dalam DPA OPD x 100%	- Program RENJA OPD yang diakomodir dalam RKA OPD, sebanyak 17 program - Program dalam DPA OPD, sebanyak 17 program	100%	Mengacu dokumen RKA OPD tahun 2017 dan dokumen DPA OPD tahun 2017
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran OPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran OPD dibagi total APBD x 100%	- Total anggaran OPD, sebesar Rp 25,121,598,000.00 - Total belanja APBD, sebesar Rp. Rp 8,834,897,375,000.00 - Total realisasi OPD, sebesar Rp 22,154,551,383.00 - Total realisasi APBD, sebesar Rp. Rp 8,239,667,069,093.14	0.28% 0.27%	
		Besaran Belanja Modal	14	Belanja modal terhadap total belanja OPD	Belanja modal dibagi total belanja OPD x 100%	- Belanja Modal OPD, sebesar Rp 933,330,000.00 - Total Belanja OPD, sebesar Rp 25,121,598,000.00 - Realisasi Modal OPD, sebesar Rp 701,785,000.00 - Realisasi OPD, sebesar Rp 22,154,551,383.00	3.72% 3.17%	

NO.	ASPEK	FOKUS	NO.	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa OPD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Total belanja pemeliharaan OPD, sebesar : Rp 1,231,930,000.00 - Total belanja barang dan jasa OPD, sebesar : Rp 8,703,000,000.00 - Total realisasi belanja pemeliharaan OPD, sebesar : Rp 1,002,297,134.00 - Total realisasi belanja barang dan jasa OPD, sebesar : Rp 8,256,313,248.00 	14.16%	
			16	Total belanja pemeliharaan	Total belanja pemeliharaan di bagi total belanja OPD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Total belanja pemeliharaan OPD, sebesar : Rp 1,231,930,000.00 - Total Belanja OPD, sebesar : Rp 25,121,598,000.00 - Total realisasi belanja pemeliharaan OPD, sebesar : Rp 1,002,297,134.00 - Total realisasi belanja OPD, sebesar : Rp 22,154,551,383.00 	4.90%	
		Laporan Keuangan OPD	17	Keberadaan laporan keuangan OPD (Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan OPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)	Ada Laporan keuangan sebanyak 3 jenis : 1. Laporan LRA 2. Laporan Neraca 3. Laporan Calk	Ada sebanyak 3 jenis	Data Pendukung : Fotocopy LRA Data Pendukung : Fotocopy Neraca Data Pendukung : Fotocopy CALK
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset OPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset OPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset OPD	Ada - Buku Inventaris Barang	Ada	Data Pendukung : Buku Inventaris Barang
		Penggunaan Asset OPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh OPD	Jumlah asset yang tidak digunakan OPD dibagi total asset yang dikuasai OPD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Asset yang tidak digunakan, sebanyak : Rp - - Asset yang dikuasai OPD, sebanyak : Rp 35,691,333,903.00 	0%	Data Pendukung : Nilai Aset Tetap di Neraca
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas/prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas/prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil Keliling 5. Pengumuman di Media Masa	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jenisnya : 1. Website 2. Papan Pengumuman 3. Pengumuman Media Masa 4. Leaflet 5. Layanan SMS	Ada Ada Ada Ada Ada	
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Ada Survey tentang kepuasan pengunjung website Dinas Perkebunan Prov. Kaltim	Ada	



DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

WEBSITE : www.disbun.kaltimprov.go.id

EMAIL : www.disbun_kaltim@yahoo.com